



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 91 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- b. Bidang Pemerintahan Nagari, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Nagari;
 2. Seksi Keuangan dan Aset Nagari; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Nagari.
- c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat; dan
 3. Seksi Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat.
- d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan SDA dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Seksi Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
- e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Kawasan Perdesaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

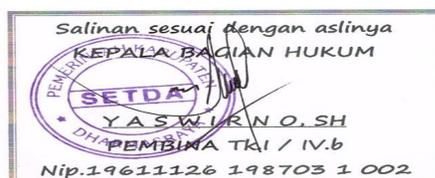
SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 93

LAMPIRAN

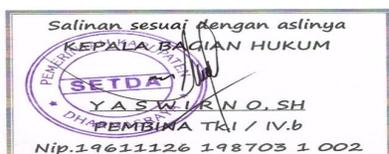
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 91 Tahun 2017
 Tanggal : 2 November 2017
 Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan
	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Program dan Laporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Pemerintahan Nagari	
	Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Analis Institusi Masyarakat Pedesaan 3. Analis Produk Hukum 4. Analis Desa / Kelurahan
	Seksi Keuangan dan Aset Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa 3. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 4. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
	Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan 2. Analis Pembelajaran Kursus dan Pelatihan 3. Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat	
	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga 2. Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana 3. Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat 2. Analis Komunitas Adat 3. Analis Nilai Budaya 4. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
	Seksi Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat 2. Pengelola Partisipasi 3. Perancang Bahan Partisipasi
4	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna	
	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Laporan Keuangan 2. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan 3. Penelaah Pengembangan Usaha
	Seksi Pengembangan SDA dan Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 2. Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 3. Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi 4. Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop
	Seksi Kelembagaan Pangan dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha 2. Fasilitator Kelembagaan Pemasaran 3. Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah
5	Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Program Pembangunan 2. Pengadministrasi Perencanaan dan Program 3. Analis Perencanaan dan Kerjasama
	Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan 2. Analis Prasarana Kota dan Pedesaan
	Seksi Pengembangan dan Kerjasama Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kemitraan 2. Analis Kerjasama Lintas Sektor 3. Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama



BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA